

**GERAKAN WANITA MENOLAK POLIGAMI 1953-1974, :
KASUS PERNIKAHAN KE- DUA SUKARNO**

MARIA MERDU WATI SIHOMBING

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : Sihombingmaria10@yahoo.co.id

Abstrak

Poligami merupakan masalah yang banyak dialami kaum perempuan di seluruh dunia. Dampak dari pernikahan poligami sangat merugikan perempuan oleh sebab itu kaum perempuan yang telah sadar dengan penderitaannya berjuang keras untuk mengatasi masalah tersebut. Perjuangan kaum perempuan untuk menghapuskan pernikahan poligami di mulai sejak 1953 di Jakarta, akan tetapi di tahun 1954 hingga 1973 kaum perempuan semakin gencar untuk memperjuangkan haknya. Alasan semakin gencernya perjuangan kaum perempuan adalah akibat pernikahan poligami yang dilakukan oleh Presiden Sukarno di tahun 1954, hal ini menjadi sorotan publik sebab hal ini dianggap merendahkan martabat kaum perempuan dan merusak nama baik Presiden Sukarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia.

Penelitian ini membahas, 1. Mengapa perempuan Indonesia menolak poligami?, 2. Mengapa perkawinan Sukarno menuai reaksi dari kaum perempuan?, 3. Bagaimana bentuk reaksi gerakan perempuan tersebut dilakukan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah terdiri dari Heuristik berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah utama yaitu berupa koran yang sejaman dengan peristiwa tersebut seperti Koran Berita Indonesia 1955, Duta Masyarakat 1965, Indonesia Berjuang 1955, Indonesia Raya 1954 & 1956, Pedoman 1954, dan Sinpo 1954 dan sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang gerakan wanita, pernikahan Sukarno dan poligami. Melakukan kritik terhadap sumber primer dan sekunder, Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah didapatkan dari sumber primer dan sekunder, dan Historiografi.

Hasil dari penelitian ini adalah poligami merupakan salah satu bentuk penindasan tersembunyi bagi kaum perempuan. Berakarnya adat budaya feodalisme yang berusaha melanggengkan budaya patriarki sungguh merugikan kaum perempuan. Pemerintah yang kurang memperhatikan persoalan-persoalan tentang perempuan menjadi suatu pemicu timbulnya pergolakan dari kaum perempuan agar haknya sebagai seorang perempuan maupun istri di lindungi. Kaum perempuan berupaya keras mengajukan berbagai tuntutan dan mengambil tindakan berdemonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah mengenai pernikahan yang merugikan kaum perempuan dicabut.. harapan terbesar kaum perempuan adalah agar mereka dapat hidup dengan keadilan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki, sehingga mendesak pemerintah agar segera menyusun undang-undang perkawinan agar hak kaum perempuan dapat terjaga.

Kata Kunci: Poligami, Gerakan Perempuan, Patriarki.

Abstract

Polygamy is a real problem which is experienced by lots of women around the world. Polygamous marriages give huge effects which cause a very detrimental to the pertinent women. Based on that reason, women, who have been aware of the misery, are striving hard to resolve the issue. The women's struggle to eliminate polygamous marriages was started from 1953, but in 1954 until 1973, women were more incentive to fight for their rights. The reason of the incessant of women's struggle is as a result of polygamous marriages which were committed by President Sukarno in 1954. It became a public attention because it was considered of women demeaning and smugged the reputation of President Sukarno as the leader of Indonesia nation.

This study discusses about 1) why do women Indonesia reject polygamous marriage? 2) Why does the second marriage of Sukarno reap the reaction of women kind? 3) What sort of reaction of the women's movement was done? This study uses historical research which consists of 1) heuristic that were collected from primary and secondary historical sources, 2) criticism of primary and secondary sources, 3) the interpretation which was done by connecting the obtained facts from primary and secondary sources, and 4) historiography.

The result of this study is that polygamous marriage is a hidden oppression for women kind. The rootedness of Feudalism entrenched cultural which obtain to perpetuate a patriarchal culture in which it actually brings disadvantages for women kind. The government gave less attention concerning to the issues women. That becomes a trigger of women upheaval for their rights as a woman and wife to be protected. Women kind strived to put in claims concerning on their rights and took actions by making some demonstrations to oppose the government policies regarding to the marriage which brought disadvantages of women that had to be revoked. The biggest expectation of women kind is that they can live with justice and equality with men, thus they were urging the government to draw up the marriage legislation immediately so that women's rights could be maintained.

Keywords: Polygamy, Women's Movement, Patriarchy.

PENDAHULUAN

Kebudayaan patriarki telah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga hal ini yang melemahkan kedudukan dan kekuatan kaum perempuan.¹ Hingga kaum perempuan merasa terpenjara oleh aturan-aturan adat kebiasaan masyarakat, seperti adat Jawa kuno terhadap kedudukan kaum perempuan tidak lepas dari dapur, kasur, sumur, luhur. Selain itu kaum perempuan juga harus menguasai tugas utama perempuan yaitu macak, masak, manak, merupakan suatu kriteria yang harus dimiliki kaum perempuan apabila tidak dikuasai maka ia dapat disebut gagal sebagai seorang perempuan. Hal seperti inilah yang menimbulkan pandangan bahwa kaum perempuan "lemah" dan hanya sebagai "pandamping hidup". Posisi perempuan yang dianggap tidak terlalu penting itu tersebut membatasi ruang gerak kaum perempuan.

Diskriminasi yang terjadi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki ini, menuai banyak konflik khususnya bagi kaum perempuan yang merasa menderita. Dilihat dari kisah masa lampau seorang tokoh feminis yaitu Kartini yang merasa terkungkung dengan adat Jawa yang disebut *pingit*

(*dipingit*).² Penderitaan yang dialami oleh Kartini ternyata juga dirasakan oleh seluruh kaum perempuan, yang terikat dengan budaya patriarki. Fakta diatas tersebutlah yang mendorong lahirnya kesadaran kaum perempuan, untuk membebaskan diri dari adat istiadat leluhur menyebabkan penderitaan. Selanjutnya dengan tumbuhnya kesadaran akan hak-hak dan kepentingannya tersebut, kaum perempuan mulai memperjuangkan nasibnya dengan melahirkan gerakan feminisme yang menuntut dihapuskannya diskriminasi gender.

Gerakan perempuan memperjuangkan hak-hak dasar dan kepentingan perempuan untuk kesejahteraan, serta menuntut dihapuskannya diskriminasi gender yang menyebabkan penderitaan bagi kaum perempuan. Pada tahun selanjutnya gerakan perempuan juga memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak. Selain masalah diskriminasi gender, masalah terberat yang harus dihadapi oleh kaum perempuan selanjutnya adalah masalah poligami yang menimbulkan banyak konflik dan penderitaan bagi kaum perempuan. Tindakan praktik poligami yang sering terjadi dikalangan masyarakat

¹ Eka Budianta. 2006. *Mekar di Bumi*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet, hlm. 62.

² Naning Pranoto. 2010. *HerStory: Sejarah Perjalanan Payudara: Mengungkap Sisi Terang - Sisi Gelap Permata Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 101.

mengakibatkan penyiksaan dan penderitaan bagi kaum perempuan. Kesejahteraan kaum perempuan yang rendah dan kenyamanan anak dalam suatu keluarga dipertaruhkan apabila terjadi poligami. Kekuasaan yang dimiliki kaum laki-laki terhadap perempuan dalam suatu rumah tangga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan apabila menghadapi kesalahpahaman dalam rumah tangga. Apabila kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi (KDRT), maka keharmonisan dalam keluarga tidak ditemukan dan kekerasan dalam rumah tangga meningkat dengan sangat cepat. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 1998, ditemukan 4 (empat) dari 5 (lima) pembunuhan di dalam rumah adalah pembunuhan suami terhadap istri.³

Berdasarkan perspektif budaya patriarki, yang menomorsatukan kaum laki-laki, mengobjekkan dan merendahkan perempuan. Memicu banyak ketidakadilan yang dialami kaum perempuan, hingga status sebagai seorang istri pun mulai direndahkan. Hal ini menimbulkan masalah bagi kaum perempuan, terutama dalam hal perkawinan. Dimana laki-laki menggunakan kuasanya sebagai kepala rumah tangga, untuk bertindak dan mengatur rumah tangganya sesuai keinginannya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa laki-laki menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pendamping hidup untuk merawat anak, mengurus rumah dan sebagai pemenuhan seks. Pola pikir kaum laki-laki yang salah ini, membawa konflik baru yaitu laki-laki melakukan praktik poligami. dimana umumnya praktik poligami adalah suatu tindakan egois laki-laki karena hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Awal munculnya praktik poligami dalam masyarakat Indonesia pertama kali di kenal dengan istilah pergundikan. Perubahan dalam politik penjajahan Pemerintah Belanda pada akhir abad ke-19 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kebijakan ekonomi dari system monopoli ke modal swasta sehingga membawa pengaruh bagi kehidupan umum masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi awal kemunduran kedudukan kaum perempuan, dimana tanah disewakan kepada tuan tanah swasta yang mulai membuka perusahaan dan perkebunan. Tuan tanah tersebut seluruhnya berkuasa atas penduduk di wilayahnya. Misalnya memerintahnya seorang Sultan Andries De Wilde, yang tinggal bersama beberapa orang gundik dan mempunyai

perempuan muda di antara hambanya.⁴ Hal ini menggeser tempat perempuan dari kedudukan subjek menjadi objek.

Poligami adalah ikatan perkawinan, dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami, suami yang memiliki beberapa istri.⁵ Praktik poligami ini menimbulkan penyiksaan psikis seperti hinaan, caci maki dan perkataan kasar dan penyiksaan fisik seperti pukulan dan tamparan, hal ini disebabkan pergeseran makna seorang istri dalam keluarga. Dimana istri pertama ataupun yang kedua dalam realitanya harus dihadapkan pada pembagian, pembatasan dan ekstra kesabaran.

Timbulnya masalah baru yang diakibatkan praktik poligami yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi topik hangat dan sorotan masyarakat luas. Kaum perempuan yang melihat hal ini merasakan ketidakadilan, tidak dihargai dan tidak dihormati. Hal ini semakin parah karena kaum perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri karena tidak adanya undang-undang ataupun hukum yang melindungi hak perempuan dan melarang poligami. Hal ini mendorong kaum perempuan untuk bergerak memperjuangkan hak-haknya, menuntut kebebasan dan meniadakan penindasan terhadap perempuan.

Gerakan perempuan mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar menghapuskan poligami dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban kaum perempuan. Namun, perhatian pemerintah yang sangat sedikit terhadap nasib kaum perempuan menyebabkan lambatnya proses penyusunan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini mendorong kaum perempuan untuk bangkit dan mendobrak aspek hukum yang ada, menginginkan perubahan hukum dan perbaikan terhadap situasi dan kondisi dalam masyarakat. Perjuangan kaum perempuan ini dimulai dengan adanya kegiatan perkumpulan perempuan dan pembentukan kelompok-kelompok yang nantinya berdiri menjadi suatu organisasi perempuan.

Perjuangan kaum perempuan untuk menghapus diskriminasi gender berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia perjuangan kaum perempuan berfokus terhadap penolakan poligami. Dalam hal ini kaum perempuan paling aktif melakukan perjuangan. Aksi gerakan perempuan

³ Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Konstitusi*, vol.1 no.1, th.2008, hlm.19.

⁴ Tineke Hellwig.2007.*Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,hlm.19.

⁵ Siti Musdah Mulia.2004.*Islam Menggugat Poligami*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,hlm.43.

menolak poligami pada tahun 1953, dimana kaum perempuan berdemonstrasi di depan Istana Merdeka. Tujuan dari tindakan tersebut adalah agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 yang membenarkan poligami dengan memberikan tunjangan pensiun baik kepada istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Presiden Sukarno menyatakan dukungannya kepada kaum perempuan. Dalam hal ini Presiden Sukarno memberikan saran kepada kaum perempuan agar bekerja dan berjuang lebih keras hingga cita-cita kaum perempuan yang menginginkan disusunya Undang-Undang Perkawinan tercapai.

Kesadaran perempuan mengenai hak dan kepentingan perempuan, diawali dengan tindakan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 pada tahun 1952 yang membenarkan poligami. Peraturan Pemerintah tersebut memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini yang menimbulkan banyak konflik dikalangan perempuan dan segera melakukan penolakan terhadap PP No.19 tersebut. Awal pergerakan perempuan dimulai oleh organisasi Persatuan Perempuan Republik Indonesia (PERWARI) dan Wani (Perempuan Negara Indonesia) serta diikuti oleh organisasi-organisasi Perempuan lainnya yang mempunyai asas dan tujuan yang sama. Organisasi-organisasi lain tersebut yang mempunyai kegiatan dalam bidang sosial dan budaya.

Perjuangan kaum perempuan menuntut dihapusnya poligami semakin keras sejak adanya niat presiden untuk menikah lagi dengan seorang janda beranak lima. Suatu tamparan yang sangat keras bagi kaum perempuan ketika terdengar kabar bahwa Presiden Sukarno telah menikah tanpa meminta izin dan tidak menceraikan Fatmawati sebagai istri sah dari presiden Sukarno. Dalam hal ini Presiden Sukarno telah melakukan poligami. Hal ini dianggap tidak mencerminkan teladan yang baik dari seorang Presiden bagi masyarakatnya. Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia memberikan contoh yang buruk. Disamping itu kaum perempuan sangat kecewa kepada Presiden Sukarno, hal ini dikarenakan sejak awal 1953 perjuangan kaum perempuan, Presiden Sukarno telah memberikan dukungannya kepada organisasi perempuan untuk melanjutkan perjuangannya menuntut hak dan kepentingan perempuan. Sesuai dengan buku karya Sukarno yang berjudul *Sarinah* yang menjunjung tinggi kehormatan wanita. Namun pada tahun 1954 Presiden Sukarno secara resmi menikah dengan seorang janda dan

mengabaikan perjuangan kaum perempuan tersebut.

Sejarah gerakan Perempuan secara umum dimulai oleh negara Barat sebelum pecahnya revolusi Amerika dan Prancis, untuk pertama kali ada aksi pihak wanita yang tersusun, yang boleh diberi gelar "pergerakan wanita". baru di dalam revolusi tersebut kaum wanita Barat secara tersusun menuntut hak-haknya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, memprotes kezaliman atas diri mereka sebagai seks dan sebagai warga negara wanita.⁶

Di Indonesia sejarah pergerakan perempuan telah dimulai sejak abad 19 merupakan suatu gerakan yang mempunyai proses panjang. Pergerakan perempuan ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa masa lalu serta didorong oleh perasaan cemas dan keinginan adanya suatu perubahan, yang mana tindakan ini dilakukan secara bersama. Keinginan individu untuk memiliki suatu kebebasan memerlukan perjuangan yang besar. Keinginan untuk bebas tersebut diperjuangkan kaum perempuan dengan cara menuntut dihapuskannya poligami, yang mana diyakini poligami membawa dampak kekerasan fisik maupun psikologis bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian sejarah terdapat empat langkah diantaranya ialah Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi.

Tahap pertama yang dilakukan adalah Heuristik yaitu mengumpulkan sumber. Penulis berusaha melakukan pencarian sumber-sumber yang terkait tentang pergerakan perempuan, poligami dan perkawinan Sukarno dengan Siti Suhartini maupun istrinya yang lain. Penulis mendatangi berbagai instansi-instansi yang memungkinkan ketersediaan sumber sesuai dengan topik bahasan, yaitu penulis mendatangi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) disana penulis memperoleh sumber berupa koran dan buku. Setelah memperoleh sumber-sumber tersebut, memilah sumber dengan memisahkan antara sumber primer dan sumber sekunder. Sumber koran yang di peroleh tersebut merupakan sumber koran yang sejalan dengan peristiwa pernikahan poligami Presiden Sukarno. Sementara buku yang penulis peroleh merupakan sumber sekunder karena merupakan pendukung informasi dalam penulisan topik bahasan. Sumber koran yang peroleh dari PNRI terdiri dari koran *Berita Indonesia*

⁶ Sukarno, 1984. *Sarinah*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Sukarno, hlm. 115.

1955, *Duta Masyarakat* 1965, *Indonesia Berjuang* 1955, *Indonesia Raya* 1954 & 1956, *Pedoman* 1954, dan *Sinpo* 1954. Disamping itu penulis juga merasa kekurangan sumber sekunder berupa buku, sehingga melakukan pencarian sumber di perpustakaan sekitar kota Surabaya, misalnya Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung dan Perpustakaan Pusat UNESA. Tujuannya untuk mencari referensi dari berbagai buku yang membahas tentang pergerakan perempuan.

Tahap kedua ialah penulis melakukan kritik. Kritik sumber sejarah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kritik intern untuk menilai kebenaran dari sumber yang didapat dengan cara menganalisis data untuk memperoleh fakta yang relevan. Sumber utama yang berasal dari koran di pilah sesuai dengan kajian yang di bahas oleh penulis. Kemudian sumber utama yang terdiri dari *Koran Berita Indonesia* 1955, *Duta Masyarakat* 1965, *Indonesia Berjuang* 1955, *Indonesia Raya* 1954 & 1956, *Pedoman* 1954, dan *Sinpo* 1954, di kelompokkan berdasarkan topik yang dibahas yaitu kelompok koran yang membahas mengenai seputar pernikahan Presiden Sukarno dan Siti Suhartini, lalu mengelompokkan setiap tindakan reaksi yang dilakukan kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya, dan yang terakhir mengelompokkan koran yang membahas tentang poligami. pengelompokkan tersebut disusun sesuai dengan tanggal terbit koran tersebut hari, bulan dan tahun topik yang di bahas. Sehingga dari data-data tersebut diperoleh fakta-fakta sejarah.

Tahap ketiga ialah melakukan interpretasi. Penulis melakukan penafsiran, untuk mencari subjek antar fakta dari sumber utama maupun sumber sekunder terhadap teori sehingga sumber-sumber yang diperoleh kedalam fakta. Selanjutnya tahap interpretasi atau penafsiran yang dilakukan oleh penulis terhadap sumber primer maupun sumber sekunder, yang mana tujuannya adalah sama yaitu untuk menghubungkan fakta-fakta dalam pembahasan. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan teori feminisme dalam menafsirkan teks.

Tahap keempat ialah Historiografi atau penulisan sejarah. Setelah fakta-fakta tersebut ditafsirkan, maka dilakukan penulisan sejarah. ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah diolah atau disusun. Penulisan ini dilakukan secara kronologi sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan oleh penulis berdasarkan data sumber-sumber yang telah diperoleh oleh penulis yang disusun dalam sistematika di bawah ini.

HASIL PENELITIAN

Pada tahun 1953 gerakan kaum perempuan yang telah menyadari hak sipil (misalnya, hak milik, hak suara, kebebasan berbicara, kebebasan agama, kebebasan berserikat) dan kewajibannya, dan semakin berpikir kearah masa depan yang lebih baik telah mulai melakukan aksi gerakan. Bentuk reaksi penolakan kaum perempuan diwujudkan dalam suatu demonstrasi. Seperti yang diberitakan dalam koran *Harian Rakyat* pada tanggal 18 Desember 1953 tentang demonstrasi yang dilakukan oleh Wanita Jakarta menuntut hak-haknya. Demonstrasi tersebut lebih dari 3000 wanita yang tergabung dalam Perwari, Gerwis Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Perawat Wanita Indonesia serta organisasi-organisasi wanita lainnya. Demonstrasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis pagi di istana Merdeka dan Parlemen. Tujuan dari demonstrasi tersebut adalah untuk menyampaikan mosi yang menuntut agar secepatnya dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan supaya memberikan jaminan hukum bagi para wanita dan menuntut agar PP 19 segera dicabut.

Para kaum perempuan yang berdemo tersebut yang terdiri dari berbagai organisasi-organisasi perempuan yang telah sadar akan hak-Nya dan ingin terbebas dari segala bentuk penindasan dan penderitaan perempuan. Mereka merasa perlu untuk melibatkan para penguasa negara untuk melindungi hak-Nya, sehingga dengan begitu perubahan untuk kesetaraan yang diinginkan lebih mudah tercapai. Maka dari itu barisan demonstrasi delegasi wanita yang dilakukan dibawah panas terik matahari tersebut, berbondong-bondong menuju gedung Dewan Menteri di Penyambon. Delegasi wanita diterima oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan menyatakan bahwa rencana Undang-Undang Perkawinan sudah ada di tangan pemerintah. Telah dipelajari secara seksama, maka akan segera di sampaikan kepada parlemen. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo meminta kepada kaum perempuan untuk bersabar karena, di parlemen masih banyak rancangan Undang-Undang lainnya. Selain itu para wanita di minta supaya ikut memberikan pendapat mereka mengenai rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Kemudian ketua DPR Mr. Sartono memberikan tanggapan kepada para demontran tersebut. Mr. Sartono mengatakan bahwa mosi para wanita itu, pada ketika itu juga terus disampaikan kepada seksi-seksi PPK, dan Agama dan seksi Perburuhan/sosial. Kemudian setelah itu Mr. Sartono menceritakan riwayat PP 19, setelah selesai barulah barisan demonstrasi tersebut bubar dari lapangan Benteng. Barisan-barisan demonstrasi tersebut adalah barisan Gerwis yang panjang dan dengan gembira bernyanyi-nyanyi di sepanjang jalan. Selain itu tampak pula berbaris dengan tegap diantara beribu-ribu wanita tersebut yaitu Ny. Sudiro, Ny. Sadikin, Ny. Pudjobuntoro, Ny. Bahder Djohan, Ny. Mudigdo, Ny. Suwanti dan banyak Nyonya Permbesar lainnya.⁷

⁷ *Harian rakyat*, 18 Desember 1953. Kolom.1-2, hlm.1.

Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan kaum perempuan tersebut sangat penting mengingat pemerintah yang kurang memperhatikan nasib kaum perempuan. Pemerintah mengabaikan hak-hak kaum perempuan, yang dilembagai oleh laki-laki yang melanggar hukum alam dan bentuk dari ideology patriarkis dan praktik *sexism*. Awalnya demonstrasi yang dilakukan kaum perempuan tersebut mendapat dukungan dari Presiden Sukarno, yang meminta kepada kaum perempuan agar terus berjuang bahkan lebih keras lagi sampai cita-cita kaum perempuan tercapai. Dukungan dari Presiden Sukarno tersebut menjadi suatu motivasi bagi kaum perempuan untuk berjuang lebih keras, selain itu di dalam buku Sarinah menjanjikan kemerdekaan bagi kaum perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari respon Presiden Sukarno dalam menanggapi aksi demonstrasi tersebut Presiden Sukarno mengatakan bahwa tuntutan kaum wanita tersebut mendapat perhatian sepenuhnya. Tetapi dalam hal ini kekuasaan tertinggi adalah terletak pada DPR. Presiden Sukarno menganjurkan kepada kaum wanita agar agar supaya lebih keras bekerja dan berjuang, sehingga dapat mempunyai wakil-wakil lebih banyak di Parlemen. Sebab dengan begitu maka segala cita-cita kaum wanita gampang terkabul.⁸

Kasus perkawinan Sukarno-Suhartini dilihat sebagai persoalan mendasar yang saling berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini berlangsung pada bulan Juni 1954.⁹ Sebenarnya masih dalam tanda tanya besar, hal ini disebabkan pernikahan tersebut dirahasiakan dari pemerintah dan publik. Pada tahun 1954 terjadi peristiwa menggemparkan seluruh bangsa Indonesia, dimana terdengar kabar bahwa Presiden Sukarno menikah dengan seorang janda beranak lima asal Salatiga. Hal ini diketahui pada pertengahan bulan September 1954 melalui surat kabar "Indonesia Raya" yang memberitakan masalah pernikahan ke-2 Sukarno tersebut. awal munculnya berita pernikahan Sukarno tersebut bersumber dari sebuah surat yang dikirim oleh PERWARI.¹⁰

Bung Karno bukanlah manusia kecil atau masyarakat biasa yang berprofesi sebagai supir angkot, yang kehidupannya tidak perlu untuk di soroti. Akan tetapi dalam hal ini berbeda, dimata rakyat Bung Karno adalah seorang pemimpin besar. Resminya ia adalah presiden kepala negara, oleh karena itu ia adalah persona-sosial. Dimana seluruh perbuatannya akan berpengaruh baik dan buruknya kepada masyarakat. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar apabila masyarakat umum mencapuri persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupannya.

⁸ *Indonesia Raya*, 18 Desember 1953.kolom.1-2,hlm.1.

⁹ *Indonesia Raya*, 20 September 1954.kolom.1-4,hlm.1.

¹⁰ *Indonesia Berjuang*, 12 Januari 1955.kolom.1-2,hlm.2.

Karena dengan begitu posisi Bung Karno sebagai seorang pemimpin diakui. Seperti yang diberitakan dalam Pedoman pada 20 september 1954, bahwa organisasi wanita pada tangga 18 September 1954 di Jakarta memutuskan kepada masyarakat agar peristiwa perkawinan Presiden tidak besar-besarkan dan dibahas secara tidak sopan. Maksud organisasi wanita tersebut agar nama baik Presiden tidak di buruk-burukkan, akan tetapi tindakan tersebut ingin menjaga ketinggian martabat dan kedudukan Presiden republik Indonesia.¹¹

Sukarno sebagai symbol bapak bangsa dan telah beristri Fatmawati menikahi Siti Suhartini. Presiden Sukarno memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia, hal ini karena statusnya sebagai pemimpin negara telah mencoreng harga diri kaum perempuan. Pernikahan poligami yang dilakukannya secara rahasia tidak sesuai dengan hukum Islam, ia bertindak gegabah dalam memutuskan suatu pernikahan. Dari perbuatan yang dilakukan Sukarno dapat dipahami bahwa Sukarno masih melestarikan budaya patriarki dalam pandangannya mengenai perempuan. Bisa saja pendorong Sukarno menikahi Siti Suhartini adalah sebagai wujud dari kebudayaan feodal pada masa raja-raja jaman dahulu.

Pernikahan presiden Sukarno dengan Siti Suhartini memiliki banyak kejanggalan, dimana terdapat ketidakjujuran yang dilakukan oleh Siti Suhartini. Hal ini dapat dilihat dari catatan perceraian antara Suwondo dan Siti Suhartini dalam buku cerai dikantor Urusan Agama Salatiga, dan dengan resmi bercerai pada tanggal 12 bulan April 1954.¹² hal ini sangat berbeda dengan surat cerai yang digunakan siti Suhartini ketika menikah dengan Presiden Sukarno, yaitu tertulis bercerai pada 12 April 1952. Perbedaan tahun tersebut membuat heboh masyarakat luas hingga akhirnya diketahui bahwa Hartini meminta kepada pihak Kantor Urusan Agama (K.H.Isom) agar mengganti tahun perceraianya, pada surat cerai yang diberikan Hartini tertulis tanggal 12 April 1954, kemudian diganti menjadi 12 April 1952. Hal ini atas permintaan Siti Suhartini dengan alasan untuk menghindari suatu halangan.

Berdasarkan surat cerai palsu tersebut, Siti Suhartini dapat melangsungkan pernikahan dengan presiden Sukarno pada bulan Juni 1954. Jika dihitung dari surai cerainya tanggal 12 April 1954 hingga ke pernikahannya Juni 1954, maka pernikahan tersebut dilangsungkan hanya selisih 3 bulan. Sementara menurut hukum Nikah Cjerei, Rdujuk, pernikahan yang dilakukan seturut dengan ajaran agama Islam.¹³ Berhubung Presiden Sukarno dan Siti Suhartini sama-sama menganut Islam maka pernikahan harus menunggu masa idah, maksudnya ialah menunggu sampai 100 hari lamanya. Mengingat

¹¹ *Pedoman*, 20 September 1954. Kolom.1-2,hlm.1.

¹² *Pedoman*, 9 Oktober 1954. Kolom 8-9,hlm.1.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

pernikahan tersebut dilakukan bulan Juni maka dapat dikatakan belum habis masa idahnya. Disamping itu jika di lihat pada hukum Islam bahwa pernikahan sebelum masa idahnya berakhir maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

Wakil Perdana Menteri II Zainul Arifin mengatakan bahwa presiden Sukarno tidak mengirim surat kepada kabinet agar Siti Suhartini diakui sebagai istri kedua.¹⁴ Berdasarkan pada pengakuan wakil Perdana Menteri II Zainul Arifin tersebut, maka dapat diketahui bahwa pernikahan presiden Sukarno dengan Siti Suhartini belum diketahui pemerintah dan belum dibicarakan masalah mengenai pernikahan presiden Sukarno tersebut. Meskipun terdengar kabar bahwa Direktur Kabinet Presiden telah menyampaikan surat mengenai pernikahan presiden Sukarno tersebut, meskipun pada akhirnya pemerintah menyediakan perlengkapan-perengkapan untuk menerima Siti Suhartini layaknya istri presiden yang sah. Secara tidak langsung pemerintah harus mempersiapkan biaya untuk membiayai kehidupan Siti Suhartini dan kelima anaknya karena statusnya sebagai istri presiden. Dalam hal ini pemerintah juga kewalahan, karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai istri kedua presiden.

Banyaknya kejanggalan dalam pernikahan presiden Sukarno dengan Siti Suhartini, sehingga perlunya mengadakan penyelidikan ulang. Maka dari itu wartawan Indonesia Raya melakukan penyelidikan ke Tjipinas dengan maksud melakukan interview kepada penghulu yang mengawinkan Sukarno dengan Siti Suhartini dan Kantor Agama Patjet. Menurut Hadji Sarkosi, Kepala Kantor Agama Patjet dan penghulu mengatakan bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 7 Juli 1954. Hal ini bertentangan dengan informasi istana yang disiarkan oleh kantor berita.

Hadji Sarkosi selaku Kepala Kantor Agama Patjet serta menjadi penghulu yang menikahkan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini. Ia mengaku bahwa dirinya yang telah menikahkan presiden Sukarno dengan Siti Suhartini pada malam Rabu tanggal 7 Juli 1954 dengan mahar sebesar seratus Rupiah dibayar tunai. Dengan dihadiri sembilan orang saksi yaitu Presiden Sukarno sendiri, tuan Usman ayah angkat Hartini, Jendral Major Suhardjo, Tukimin, Pak Muhammad (kuasa istana Tjipanas), Hadji Sarkosi (Kepala Agama), Mohammad Hasam (Imam Patjet) dan dua orang lainnya. Saksi lainnya ialah Nyonya Usman, Nyonya Siti Suhatini, Nyonya Zulaiha, istri Pak Muhammad. Ketika ditanyakan mengenai surat cerai yang diserahkan oleh Hartini yang berbeda dengan Kantor Agama di Salatiga, Hadji Sarkosi mengatakan bahwa Tanggal cerai 12 April 1952 cocok dengan tanggal materainya. Selain itu Hartini mengakui kepada Hadji Sarkosi bahwa ia telah habis masa idahnya, dan menikahi Sukarno dengan alasan suka dan izin.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari Hadji Sarkosi sebagai Penghulu yang mengawinkan Presiden Sukarno dan Siti Suhartini beserta bukti-buktinya, dapat di percaya bahwa Pernikahan presiden Sukarno dengan Siti Suhartini telah sah. Meskipun hal ini masih sulit diterima masyarakat khususnya kaum perempuan Indonesia yang tidak suka dengan latar belakang Siti Suhartini.

Pada 12 Oktober 1954 pada koran Indonesia Raya memberitakan bahwa Wanita Nasional Sumatera Utara mengajukan tuntutan atas pernikahan Presiden Sukarno. Wanita Nasional Sumatera Utara mengadakan rapat pada 8 Oktober 1952 di Pematang Siantar, hasil dari rapat tersebut diambil keputusan bahwa menganjurkan kepada Nyonya Hartini agar segera menarik diri selaku istri bung Karno untuk menjaga nama baik Presiden dan memelihara status wanita (setaraf dengan perjuangan wanita) bila statusnya sebagai istri yang tidak diperkenalkan. Dalam hal ini Wanita Nasional Sumatera Utara secara tidak langsung telah mengajak Nyonya Hartini untuk berjuang bersama dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan cara meninggalkan Presiden Sukarno. Karena seperti yang diketahui hanya Fatmawati yang diperkenalkan sebagai istri Presiden. akan tetapi Nyonya Hartini seakan menutup mata dan telinganya seakan setuju dengan pernikahan poligami tersebut. sehingga dapat dikatakan bahwa langgengnya budaya patriarki tersebut tidak jauh akibat dari kesalahan perempuan itu sendiri. Akibatnya Wanita Nasional Sumatera Utara menuntut apabila ternyata menurut penyelidikan Hartini telah tercemar namanya, maka diminta agar Presiden menceraikan Hartini atau Presiden mengundurkan diri dari jabatannya.¹⁶ Selanjutnya Wanita Nasional Sumatera Utara juga mengajukan tuntutan kepada Kepala Urusan Agama supaya menyelidiki pernikahan Bung Karno dengan Nyonya Hartini sah atau tidak. Apabila hasil penyelidikan tersebut pernikahan itu tidak sah, diminta agar pernikahan itu dibatalkan. Selain itu Wanita Nasional Sumatera Utara mendesak Pengurus Besar Perwari cs, agar meninjau kembali perjanjiannya dengan Presiden setelah mengikuti penyelidikan pernikahan Presiden tersebut. Tuntutan yang dibuat oleh kaum Wanita Nasional Sumatera Utara sama dengan tuntutan yang dibuat oleh kalangan organisasi perempuan lainnya yaitu mendesak agar direncanakan Undang-Undang Perkawinan. Wanita Nasional Sumatera Utara juga mendesak kepada Pengurus Besar Wanita Nasional di Jakarta agar turut memperjuangkan hasrat-hasrat cabang-cabang di Sumatera Utara mengenai Pernikahan Bung Karno dengan Nyonya Hartini. Sebelum Putusan tersebut diambil sebelumnya Pimpinan Wanita Nasional Sumatera Utara berpidato yaitu Nyonya Berthy Siregar mengatakan bahwa Perkawinan Presiden tersebut bukan masalah Prive saja, sehingga Wanita Nasional mengusulkan kepada Pemerintah agar masalah ini dipertimbangkan di Parlemen. Dalam hal ini tampak

¹⁴ *Pedoman*, 23 September 1954. kolom.3-4, hlm.1.

¹⁵ *Indonesia Raya*, 18 Oktober 1954. kolom.1-3, hlm.1.

¹⁶ *Indonesia Raya*. 12 Oktober 1954. *Wanita Nasional Sumatera Utara mengajukan tuntutan atas pernikahan Presiden Sukarno*. kolom.1, hlm.1.

bahwa kaum perempuan menggunakan negara dal mencapai tujuannya. Karena hal ini memiliki sebab akibat yang dapat menimbulkan kekeruhan dalam kabinet Presiden dan menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat, dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Presidennya.¹⁷

Penolakan Juga datang dari kalangan Wanita Nasional Sumatera Utara yang menuntut agar Bung Karno menceraikan Siti Suhartini. Sebelumnya Wanita Nasional Sumatera Utara belum pernah mengadakan tuntutan mengenai pernikahan Presiden tersebut, hal ini karena belum yakin dengan berita pernikahan Presiden tersebut. seiring dengan makin gencarnya berbagai kalangan wanita mengajukan tuntutan dan surat kabar yang tidak henti-hentinya memberitakan perkembangan penyelidikan terhadap pernikahan tersebut, akhirnya Wanita Nasional Sumatera Utara segera mengambil tindakan yaitu tuntutan kepada Presiden Sukarno dan Pemerintah.

Berdasarkan ulasan pemberitaan mengenai tuntutan yang ambil oleh Wanita Nasional Sumatera Utara diatas, tuntutan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan suatu hukum yang dapat melindungi kaum perempuan terutama dalam rumah tangga. Dimana organisasi Wanita Nasional Sumatera Utara ini adalah layaknya suatu dari gerakan feminis liberal, yang konsisten dengan etos Amerika yang dominan dalam menerima prinsip dasar dan kelebagaannya, orientasi reformasinya dan seruannya terhadap nilai-nilai individualis, pilihan, kebebasan, dan kesamaan peluang. Karena gerakan feminisme pertama kali di dunia Barat, yang akhirnya memberikan kesadaran bagi kaum perempuan Indonesia yang merasa di perlakukan dengan tidak adil dan jauh dari kesetaraan jender serta kesejahteraan perempuan akibat terpenjara dalam adat feodal. Maka dari itu Wanita Nasional Sumatera Utara yakin bahwa Undang-Undang perkawinan sebagai tujuan utama untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seluruh kaum perempuan di Indonesia. Tuntutan Wanita Nasional Sumatera Utara tersebut secara tidak langsung ingin membersihkan nama baik Presiden Sukarno agar tetap berada dalam pernikahan monogamy selain itu untuk keadilan dan tanggung jawab Presiden selaku Pemimpin Negara. Tuntutan yang dilakukan kaum Wanita Nasional Sumatera Utara sebenarnya juga untuk melindungi seluruh perempuan Indonesia termasuk Nyonya Hartini sendiri yaitu mengenai haknya selaku perempuan yang menuntut keadilan atas dirinya. Apabila Nyonya Hartini tidak dapat diperlakukan adil seperti Fatmawati, agar Nyonya Hartini tidak di jadikan seperti boneka mainan. Karena apabila Nyonya Hartini hanya sebagai istri Bung karno tetapi tidak sebagai istri Presiden dan tidak tinggal di Istana maka, hal ini merupakan perlakuan tidak adil dan bertentangan dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa kedudukan istri pertama dan kedua tidak boleh dibedakan bahkan seujung rambut pun. Dalam hal ini tampak jelas bahwa Presiden Sukarno tidak dapat memberikan keadilan terhadap istri-istrinya.

¹⁷ *Indonesia Raya*, 12 Oktober 1954, kolom.5, hlm.1.

Pada 27 September 1954 dalam koran Pedoman terdapat berita tentang seruan dari dewan provinsi Partai Nasional Indonesia Jawa Tengah kepada Dewan Cabang PNI di seluruh Jawa Tengah mengenai pernikahan Presiden Sukarno. Hal ini dilakukan untuk mendesak pemerintah agar mencampuri persoalan pernikahan Sukarno dengan sasaran :

1. Merencanakan Undang-Undang tentang perkawinan Presiden (untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan selanjutnya)
2. Mengadakan pembersihan staf cabinet Presiden.
3. Menuntut perbuatan sabotage dari perantara perbuatan itu, karena terdapat didalamnya dua orang anggota bekas Nefis Belanda.
4. Setelah diadakan penyelidikan seksama tentang nama diri pribadi Ny. Hartini, dan apabila ternyata namanya busuk agar Presiden menceraikannya.¹⁸

Dari seruan dewan provinsi Partai Nasional Indonesia Jawa Tengah kepada Dewan Cabang PNI di seluruh Jawa Tengah tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik Presiden Sukarno sebagai seorang pemimpin bangsa Indonesia. Menolak pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini dilakukan karena banyaknya berita yang tersebar di koran bahwa Ny. Hartini merupakan wanita yang buruk reputasinya. Latar belakang Ny.Hartini yang pernah dikabarkan merupakan wanita bayaran di kalangan elit dan selir dari adik Pakubuwono yakni seorang pangeran dari Solo. Hal ini juga merendahkan kaum perempuan, karena Fatmawati sebagai istri sah Sukarno dimadu dengan seorang Janda. Tindakan untuk mendesak Undang-Undang perkawinan dimaksudkan untuk mencegahnya kembangnya pernikahan poligami di masa mendatang, yang megancam kesejahteraan perempuan. Disamping itu diharapkan agar pemerintah bersih dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Pada 27 September 1954 dalam koran Pedoman terdapat berita tentang seruan dari dewan provinsi Partai Nasional Indonesia Jawa Tengah kepada Dewan Cabang PNI di seluruh Jawa Tengah mengenai pernikahan Presiden Sukarno. Hal ini dilakukan untuk mendesak pemerintah agar mencampuri persoalan pernikahan Sukarno dengan sasaran :

5. Merencanakan Undang-Undang tentang perkawinan Presiden (untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan selanjutnya)
6. Mengadakan pembersihan staf cabinet Presiden.
7. Menuntut perbuatan sabotage dari perantara perbuatan itu, karena terdapat didalamnya dua orang anggota bekas Nefis Belanda.
8. Setelah diadakan penyelidikan seksama tentang nama diri pribadi Ny. Hartini, dan apabila ternyata namanya busuk agar Presiden menceraikannya.¹⁹

¹⁸ *Pedoman*, 27 September 1954.kolom.1-3,hlm.2.

¹⁹ *Pedoman*, 27 September 1954.kolom.1-3,hlm.2.

Dari seruan dewan provinsi Partai Nasional Indonesia Jawa Tengah kepada Dewan Cabang PNI di seluruh Jawa Tengah tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik Presiden Sukarno sebagai seorang pemimpin bangsa Indonesia. Menolak pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini dilakukan karena banyaknya berita yang tersebar di koran bahwa Ny. Hartini merupakan wanita yang buruk reputasinya. Latar belakang Ny. Hartini yang pernah dikabarkan merupakan wanita bayaran di kalangan elit dan selir dari adik Pakubuwono yakni seorang pangeran dari Solo. Hal ini juga merendahkan kaum perempuan, karena Fatmawati sebagai istri sah Sukarno dimadu dengan seorang Janda. Tindakan untuk mendesak Undang-Undang perkawinan dimaksudkan untuk mencegahnya kembangnya pernikahan poligami di masa mendatang, yang megancam kesejahteraan perempuan. Disamping itu diharapkan agar pemerintah bersih dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Pada 11 Oktober 1954 koran Pedoman memberitakan mengenai tindakan dari organisasi-organisasi Magelang yang mengadakan rapat tertutup untuk merundingkan tentang pernikahan Bung Karno dengan Hartini. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh wakil-wakil Perwari, PWKI, Gerwani, Bhajangkari, WK Magelang, Wanita Demokrat, PPI, Persit, IPPI, IIDPP dan Golongan Indo-Belanda dan dihadiri pula oleh bagian-bagian Gerakan Organisasi Wanita setempat yaitu wakil-wakil dari SGB Kartini, Yayasan Ibu, Asrama Wanita, Consultatie buro Urusan hak-hak Wanita, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Taman Ibu, Kursus Coupepe dan penitipan Kanak-Kanak. Hasil dari pertemuan diambil sebuah Statement yang ditanda tangani oleh Ny. Kusumohadi sebagai ketua dari Organisasi Wanita di Magelang serta Nn. Subandijah sebagai penulisnya, dinyatakan bahwa 11 Organisasi Wanita yang bersidang tersebut beserta bagian-bagiannya yang mewakili 5000 anggotanya. Setelah membahas mengenai pernikahan Bung Karno dengan Ny. Hartini telah menyatakan :

- a. Menyesalkan perkawinan tersebut
- b. Mendesak pada pemerintah agar diadakan penyelidikan dan pengusutan seksama, dan selanjutnya mengambil tindakan tegas, jika perkawinan tersebut berlatar belakang yang mengandung kemungkinan-kemungkinan akan merugikan pada Negara.
- c. Menuntut terwujudnya Undang-Undang Perkawinan yang benar-benar demokratis yang dapat melindungi kedudukan dan hak-hak yang sama antara para pria dan wanita.
- d. Menuntut adanya peraturan protocol yang memberi ketentuan tentang tindakan-tindakan Kepala Negara dan Pejabat-pejabat civil maupun militer yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, guna menjujung tinggi martabat bangsa dan negara.²⁰

Desakan yang dilakukan oleh Organisasi-organisasi Wanita Magelang tersebut suatu bentuk kekesalan

terhadap tindakan poligami Sukarno. Sehingga mengadakan rapat tertutup dengan mengundang wakil-wakil dari berbagai Organisasi-organisasi wanita lainnya untuk mengambil suatu pernyataan. Karena hal ini sangat berpengaruh bagi nasib kaum perempuan di masa yang akan datang, hal ini dimaksudkan agar membuat Undang-Undang yang melindungi kaum perempuan. Hal ini dilakukan karena lambatnya tindakan pemerintah untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan.

Tuntutan yang disampaikan oleh Persatuan Wanita Kristen tersebut memiliki tujuan yang sama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya yaitu disusunnya Undang-Undang perkawinan. hal ini juga Persatuan Wanita Kristen menegaskan agar Presiden Sukarno tidak beristri dua, adalah arti agar Sukarno memilih salah satu dari keduanya yaitu Fatmawati atau Hartini. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan monogamy tetap dijunjung tinggi. Karena apabila Sukarno tidak menceraikan salah satunya maka, akan sangat merendahkan derajat kaum perempuan. Karena apabila Sukarno hanya memperkenalkan Fatmawati sebagai ibu negara (*first Lady*) dan Hartini hanya sebagai istri. berbeda pemahamannya yaitu Fatmawati hanya sebagai istri Presiden sedangkan Hartini sebagai istri Bung Karno. Sebagaimana dalam hukum Islam, suami harus berlaku adil terhadap kedua istrinya, jika Sukarno memperkenalkan Fatmawati sebagai *First Lady* maka haruslah ia juga memperkenalkan Hartini sebagai *Second Lady*. Akan tetapi tidak mungkin ada dua ibu negara sehingga ada baiknya agar Sukarno memilih salah satunya dan hidup dalam pernikahan monogamy.

Berdirinya sebuah Gerakan Anti Hartini Suwondo di Salatiga, merupakan suatu gerakan partisipasi kaum perempuan menunjukkan penentangannya terhadap kehadiran Siti Suhartini dalam rumah tangga Presiden Sukarno serta tidak menyetujui pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini. Karena dalam hal ini kaum perempuan secara bersama-sama menyatakan tuntutan dalam bentuk pamphlet. Gerakan tersebut mengirimkan surat-surat yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan Pernikahan tersebut. Alasan utama penolakan tersebut adalah karena Siti Suhartini tidak setaraf dengan Presiden Sukarno. Untuk membersihkan nama Sukarno gerakan tersebut mengatakan bahwa tindakan Bung karno itu suatu hal biasa dalam kehidupan manusia, alasan tersebut dapat diterima. Lain halnya gerakan tersebut tidak dapat diterima apabila wanita yang nikahi Bung Karno tidak setaraf dalam segala hal. Sebagai bentuk penolakan terhadap Hartini di kota Salatiga tampak pampflet-pamflet dengan potlot merah ditempelkan diberbagai tempat seperti kantor pos, gedung nasional, hingga rumah walikota mendapat tempelan tersebut. Pamflet-pamflet tersebut berisi pernyataan tidak menyetujui pernikahan Bung Karno dengan Siti Suhartini dengan menggunakan kata-kata kasar dan istilah-istilah yang telah diperhalus oleh surat kabar Kedaulatan Rakyat.²¹

²⁰ Pedoman, 11 Oktober 1954. kolom. 4-5, hlm. 1.

²¹ Pedoman 28 September 1954. kolom. 1-2, hlm. 1.

Latar belakang Siti Suhartini menjadi persoalan besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan yang tidak menyukainya. Gerakan anti Hartini menganggap status Siti Suhartini sebagai janda beranak lima, memiliki reputasi yang buruk di kalangan tetangganya di Salatiga dan banyaknya kabar buruk mengenai pribadinya. Sehingga Gerakan anti Hartini tersebut tidak mengakui adanya pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini. Sasaran dari gerakan tersebut adalah Siti Suhartini, gerakan tersebut dilakukan untuk menyingkirkan Siti Suhartini. Gerakan ini tidak terlalu gencar dalam memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan, karena sebenarnya tujuan utamanya untuk menyingkirkan Siti Suhartini.

Banyaknya tuntutan dan desakan serta tindak demonstrasi yang dilakukan kaum perempuan dalam menolak pernikahan poligami Presiden Sukarno, sehingga pemerintah memberikan respon yang positif yaitu disusunnya Undang-Undang Perkawinan. Disusunnya Undang-Undang Perkawinan merupakan pencapaian yang diperoleh para gerakan perempuan. Dimana undang-undang Perkawinan tersebut menjadi harapan dan cita-cita seluruh kaum perempuan Indonesia, karena telah ada hukum yang dapat melindungi hidupnya terutama terhadap penindasan tersembunyi yang sering terjadi dalam rumah tangga. Dikeluarkannya suatu Undang-Undang Perkawinan untuk mengisi kekurangan didalam Perundang-undangan yang akibatnya menimbulkan masalah baru negara Indonesia. suatu hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Akhirnya setelah perjuangan panjang yang dilakukan berbagai pihak khususnya organisasi perempuan yang telah mencurahkan segenap tenaga untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya, boleh merasa lega setelah disahkannya RUU Perkawinan sesuai dengan cita-cita kaum perempuan selama ini. Meskipun penyelesaian RUU Perkawinan tersebut sangat lama dan lambatnya tindakan pemerintah akan tetapi tidak mengurangi niat kaum perempuan untuk terus mendesak. Berbagai rintangan yang dilalui seperti pertentangan visi yang dimiliki oleh berbagai organisasi perempuan yang sempat membuat perpecahan diantara kaum perempuan, namun akhirnya mendapat jalan keluar yang baik. Baik itu tujuan dari organisasi Perwari, Gerwani maupun kelompok organisasi kaum perempuan Islam, yang akhirnya memperoleh hasil dari perjuangannya masing-masing sesuai dengan harapannya.

Akhirnya setelah perjuangan panjang yang dilakukan berbagai pihak khususnya organisasi perempuan yang telah mencurahkan segenap tenaga untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya, boleh merasa lega setelah disahkannya RUU Perkawinan sesuai dengan cita-cita kaum perempuan selama ini. Meskipun penyelesaian RUU Perkawinan tersebut sangat lama dan lambatnya tindakan pemerintah akan tetapi tidak mengurangi niat kaum perempuan untuk terus mendesak. Berbagai rintangan yang dilalui seperti pertentangan visi yang dimiliki oleh berbagai organisasi perempuan yang sempat membuat perpecahan diantara kaum perempuan, namun akhirnya mendapat jalan keluar yang baik. Baik

itu tujuan dari organisasi Perwari, Gerwani maupun kelompok organisasi kaum perempuan Islam, yang akhirnya memperoleh hasil dari perjuangannya masing-masing sesuai dengan harapannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan dan kedudukan kaum perempuan Jawa diketahui menempati sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), kaum laki-laki lebih di utamakan dalam segala hal. adanya sikap ketergantungan menjadi alasan kaum perempuan berada pada kelas kedua. Dalam keluarga laki-laki adalah kepala rumah tangga, sehingga kedudukan istri tergantung pada suaminya sedangkan kedudukan anak perempuan tergantung pada ayah dan saudaranya laki-laki. Pola ketergantungan ini yang membentuk kedudukan kaum perempuan melalui sifat perempuan yang dianggap lemah dan bodoh. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki menempatkan perempuan pada peran domestik sementara laki-laki di ranah publik. Hal ini mengakibatkan kaum perempuan tidak terlibat dalam pengambilan suatu keputusan sehingga perempuan hanya sebagai penerima keputusan dan melaksanakannya. Dimana kaum perempuan menjadi objek bukan sebagai subjek yang di pentingkan.

Sejak Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta gerakan perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak ingin memisahkan diri dari gerakan kemerdekaan nasional yang revolusioner dan umum, sehingga sejak itu suka duka gerakan kemerdekaan nasional menjadi suka duka gerakan wanita Indonesia. Disamping itu salah satu pendorong munculnya aksi gerakan kaum perempuan adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952. Dalam hal ini memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu merupakan suatu pandangan yang buruk terhadap martabat kaum perempuan. Selain itu, gerakan kaum perempuan Indonesia semakin gencar setelah pernikahan poligami Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini, perempuan asal Salatiga yang memiliki latar belakang kehidupan yang buruk. Pernikahan poligami Presiden Sukarno tersebut dianggap sebagai suatu permasalahan yang bertentangan antara kaum laki-laki maupun perempuan, serta menjadi permasalahan bangsa karena posisi Sukarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Banyak kabar yang menjelaskan mengenai pribadinya, yang sering digunakan sebagai selir oleh kaum elit. Hal ini yang dianggap kaum perempuan tidak pantas apabila seorang Presiden Sukarno menikahi Siti Suhartini. Disamping itu pernikahan Presiden Sukarno dengan Siti Suhartini

merupakan tindakan poligami karena Bung Karno menikah tanpa izin dari istri sahnya yaitu Fatmawati. Gerakan kaum perempuan juga menolak kehadiran Siti Suhartini sehingga mereka meminta agar Siti Suhartini menarik diri sebagai istri Presiden, karena apabila Bung Karno tidak dapat memperlakukan Siti Suhartini dengan adil seperti terhadap Fatmawati maka posisi Siti Suhartini dianggap hanya sebagai boneka Bung Karno. Hal ini dianggap merendahkan martabat kaum perempuan, karena kaum perempuan Indonesia menginginkan kebebasan dan kesejahteraan seluruh kaum perempuan di Indonesia termasuk Siti Suhartini. Hal ini yang di perjuangkan oleh gerakan kaum perempuan Indonesia agar kaum perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki dan adanya hukum yang melindungi hidup kaum perempuan.

Penulis menggunakan teori feminis liberal dalam mengkaji topik mengenai perkawinan poligami Presiden Sukarno. Berbagai aksi gerakan yang dilakukan oleh organisasi kaum perempuan dalam menolak poligami dan segala tindakan semena-mena terhadap kaum perempuan. Semua manusia mempunyai nalar, sama halnya dengan perempuan di tahun 1953 telah menyadari hal sipil misalnya hak milik, hak bersuara, hak berbicara, kebebasan agama dan kebebasan berserikat. Kesadaran kaum perempuan untuk memperoleh hidup yang sejahtera mendorong timbulnya aksi demonstrasi yang dilakukan para kaum perempuan pada tahun 1953 untuk menuntut dicabutnya PP 19 yang dianggap merugikan kaum perempuan. Demonstrasi tersebut dilaksanakan pada Kamis pagi di Istana Merdeka dan Parlemen, yang mana Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menerima delegasi wanita tersebut. Selain itu gerak kaum perempuan semakin bergolak pada tahun 1954 berbagai tuntutan yang datang dari berbagai kalangan yaitu organisasi perempuan di berbagai daerah di Indonesia yang menolak perkawinan poligami Presiden Sukarno. Hal ini karena kasus perkawinan Sukarno-Suhartini dilihat sebagai persoalan mendasar yang saling berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Bentuk reaksi kaum perempuan dalam menyampaikan tuntutan tersebut ialah dengan mengumpulkan massa yang umumnya diikuti oleh kaum perempuan dan berbagai bentuk penolakannya.

Disamping itu organisasi kaum perempuan juga mendesak pemerintah agar segera mencabut PP 19 dan menyusun Rancangan undang-Undang Perkawinan yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban kaum perempuan. Meskipun dalam perjuangan organisasi perempuan tersebut sempat terjadi perbedaan visi, akan tetapi tidak membuat

kaum perempuan berhenti berjuang. Seperti perbedaan tujuan dari organisasi PERWARI dan GERWANI, yang akhirnya hanya organisasi PERWARI dan organisasi lainnya yang memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Sementara organisasi Gerwani berbalik haluan dengan mengutamakan kepentingan anggotanya dan masuk dalam urusan politik, serta meninggalkan tujuan awalnya yaitu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Selain itu dalam hal demonstrasi mendesak di susunnya RUU Perkawinan, organisasi kaum perempuan sempat bertentangan dengan organisasi perempuan Islam yang menolak disusunya RUU Perkawinan.

Setelah perjalanan panjang perjuangan kaum perempuan menolak poligami dengan berbagai tindakan demonstrasi dan mendesak pemerintah agar menyusun RUU Perkawinan. Akhirnya pada Desember 1973 pemerintah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan dan mensahkan RUU Perkawinan tersebut yang terdiri dari 67 pasal. Meskipun proses penyusunannya sangat lambat hingga bertahun-tahun dan menghadapi berbagai tantangan dari organisasi kaum perempuan maupun laki-laki Islam, yang akhirnya melahirkan RUU Perkawinan khusus Islam. Selain itu terjadinya perbedaan pendapat diantara para konsepter RUU Perkawinan yang sempat mengakibatkan kemacetan dalam penyusunan pasal 1 RUU Perkawinan tersebut hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan kata sepakat.

B. Saran

Pandangan yang menganggap bahwa kaum perempuan adalah mahluk lemah adalah benar, untuk itu diperlukan perhatian pemerintah dalam melindungi hidup kaum perempuan. Disamping itu alangkah baiknya apabila pemerintah memberikan hukuman seberat-beratnya bagi tindakan kriminal seperti pemerkosaan, Pembunuhan dan perdagangan perempuan. Karena selain memiliki kelemahan, kaum perempuan juga memiliki kelebihan yaitu rajin dan ulet dalam melakukan pekerjaan. Maka dalam hal ini alangkah baiknya apabila meningkatkan pendidikan kaum perempuan serta tidak membatasi ruang profesi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Budianta, Eka. 2006. *Mekar di Bumi*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet.

Pranoto, Naning.2010.*HerStory:Sejarah Perjalanan Payudara: Mengungkap Sisi Terang - Sisi Gelap Permata Perempuan*.Yogyakarta:Kanisius.

Firdaus,Emilda.”Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,dalam *Jurnal Konstitusi*,vol.1 no.1,th.2008.

Hellwig,Tineke.2007.*Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Musdah Mulia, Siti.2004.*Islam Menggugat Poligami*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Sukarno,1984.*Sarinah*.Jakarta:Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Sukarno.

Harian rakyat, 18 Desember 1953.Kolom.1-2,hlm.1.

Indonesia Raya, 18 Desember 1953.kolom.1-2,hlm.1.

Indonesia Raya, 20 September 1954.kolom.1-4,hlm.1.

Indonesia Berjuang, 12 Januari 1955.kolom.1-2,hlm.2.

Pedoman, 20 September 1954. Kolom.1-2,hlm.1.

Pedoman, 9 Oktober 1954. Kolom 8-9,hlm.1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Pedoman,23 September 1954.kolom.3-4,hlm.1.

Indonesia Raya, 18 Oktober 1954.kolom.1-3,hlm.1.

Indonesia Raya.12 Oktober 1954.*Wanita Nasional Sumatera Utara mengajukan tuntutan atas pernikahan Presiden Sukarno*.kolom.1,hlm.1.

Indonesia Raya, 12 Oktober 1954,kolom.5,hlm.1.

Pedoman, 27 September 1954.kolom.1-3,hlm.2.

Pedoman, 27 September 1954.kolom.1-3,hlm.2.

Pedoman,11 Oktober 1954.kolom.4-5,hlm.1.

Pedoman 28 September 1954.kolom.1-2,hlm.1.